

## POLICY BRIEF

### “Optimalisasi Satu Data untuk Kebijakan Berbasis Bukti di Jawa Timur”

#### PENDAHULUAN

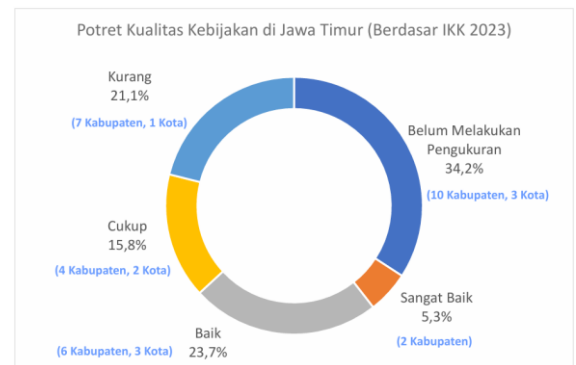
Kualitas kebijakan publik adalah kunci daya saing daerah. Namun, banyak kebijakan dibuat tanpa basis bukti yang kuat (evidenceless-based), sehingga tumpang tindih dan tidak berpihak pada kepentingan publik (Widaningrum et al., 2024). Untuk mengatasinya, pemerintah meluncurkan Satu Data Indonesia (SDI) sebagai fondasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), yang bertujuan menyediakan data akurat dan terintegrasi untuk pengambilan keputusan. Di Jawa Timur, urgensi ini sangat terasa, dimana berdasarkan data Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) tahun 2023 menunjukkan gambaran yang mengkhawatirkan: tidak ada satupun kabupaten/kota yang meraih predikat "Unggul", bahkan 21,1% masuk kategori "Kurang" dan 34,2% belum terukur (LAN RI, 2024).

Kondisi ini menegaskan bahwa ketersediaan data melalui SDI harus segera dioptimalkan untuk perbaikan kualitas kebijakan secara menyeluruh. Namun, implementasi kebijakan SDI di daerah masih menghadapi berbagai hambatan. Penelitian ini menemukan bahwa fragmentasi data antarperangkat daerah, rendahnya interoperabilitas sistem informasi, dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, khususnya fungsional analisis kebijakan, menjadi tantangan utama. Jumlah *dataset* yang terintegrasi di portal SDI Jawa Timur masih tergolong rendah, hanya sekitar 1.517 dataset, jauh di bawah provinsi lain seperti Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan data sebagai dasar penyusunan kebijakan belum optimal.

Selain itu, koordinasi antara tiga aktor utama yaitu Bappeda, Dinas Kominfo, dan BPS, masih perlu diperkuat agar mekanisme pengelolaan dan pertukaran data berjalan lebih efektif. Di sisi lain, forum statistik daerah yang semula berperan penting dalam menyinergikan data lintas perangkat daerah kini jarang dilaksanakan karena kebijakan efisiensi, yang berdampak pada menurunnya intensitas koordinasi teknis. Dengan latar belakang tersebut, policy brief ini disusun untuk menyajikan temuan utama penelitian serta rekomendasi kebijakan strategis dalam memperkuat implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di Jawa Timur. Fokusnya adalah bagaimana penguatan tata kelola data (*data governance*), peningkatan kapasitas analisis kebijakan, dan optimalisasi koordinasi antarlembaga dapat mendorong perwujudan kebijakan daerah yang lebih inklusif, akuntabel, dan berbasis bukti.

**Ditujukan kepada:** Gubernur Jawa Timur, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, dan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur

**Ditulis Oleh:** Denny Iswanto, Miskan, Nur Holifah  
(Dosen Universitas Wijaya Putra)



#### RINGKASAN EKSEKUTIF

Inisiatif SDI di Jawa Timur telah berhasil membangun kerangka regulasi dan kelembagaan untuk tata kelola data. Namun, implementasinya belum optimal untuk menghasilkan kebijakan daerah yang sepenuhnya berbasis bukti (evidence-based policy). Permasalahan utama terletak pada rendahnya kuantitas dan integrasi dataset dibandingkan provinsi lain, ketimpangan ketersediaan data antar sektor strategis, hambatan akses data antar instansi, serta keterbatasan kapasitas analisis kebijakan dalam memanfaatkan data yang ada. Policy brief ini merekomendasikan lima langkah strategis: (1) penguatan sinergi kelembagaan antara Bappeda, Dinas Kominfo, dan BPS; (2) standarisasi metadata dan variabel data; (3) optimalisasi forum statistik untuk peningkatan kapasitas SDM; (4) pengembangan platform teknologi yang interoperabel; dan (5) penguatan akuntabilitas melalui perluasan data terbuka. Implementasi rekomendasi ini akan menjadikan kebijakan daerah di Jawa Timur lebih berdampak nyata.

## PERMASALAHAN DAN ISU KEBIJAKAN

Meskipun telah memiliki landasan hukum melalui Pergub No. 81 Tahun 2020, pemanfaatan Satu Data di Jawa Timur menghadapi empat masalah mendasar:

1. Kuantitas Dataset Rendah dan Tertinggal. Jawa Timur baru memiliki 1.517 dataset dalam portal SDI (Bappenas, 2025). Angka ini sangat jauh di bawah provinsi lain seperti Jawa Tengah (71.825 dataset) dan DI Yogyakarta (15.821 dataset), yang mengindikasikan kontribusi dan pengelolaan data yang belum optimal.
2. Distribusi Data Timpang dan Tidak Merata. Terdapat ketidakseimbangan ketersediaan data yang ekstrem. Sektor sosial mendominasi dengan 37.601 dataset, sementara sektor strategis lain seperti kemiskinan (70 dataset) dan infrastruktur (189 dataset) sangat minim. Kesenjangan ini menyulitkan perumusan kebijakan yang terintegrasi (Dinas Kominfo Jawa Timur, 2025).
3. Fragmentasi Akses dan Ketergantungan pada Data Eksternal. Akses data antar instansi masih terfragmentasi ke dalam kategori "tertutup", "terbatas", dan "terbuka" tanpa mekanisme berbagi yang jelas. Akibatnya, untuk indikator strategis seperti kemiskinan dan pengangguran, perangkat daerah masih sangat bergantung pada data BPS, bukan data terintegrasi dari SDI (Fadhilah, 2024).
4. Kapasitas Analisis Kebijakan Belum Optimal. Jawa Timur memiliki 200 Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan, namun jumlah dan kompetensi ini belum cukup untuk menerjemahkan data mentah menjadi rekomendasi kebijakan yang strategis dan berdampak (Pemprov Jawa Timur, 2024). Selain itu, frekuensi forum peningkatan kapasitas (Forum Statistisi) telah berkurang dari triwulanan menjadi hanya sekali setahun, yang menghambat transfer pengetahuan.

## ALTERNATIF KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap berbagai kendala di atas, terdapat beberapa alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur:

### **Alternatif 1: Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan Satu Data**

- a. Mendorong penyusunan Perda atau Pergub baru yang memperjelas pembagian peran antara Bappeda (koordinator perencanaan), Dinas Kominfo (wali data), dan BPS (pembina data).
- b. Membentuk Tim Koordinasi Data Terpadu Daerah (TD2D) di bawah Sekretariat Daerah sebagai wadah koordinasi lintas perangkat daerah dan pusat data sektoral.
- c. Mengintegrasikan SDI Jawa Timur dengan Satu Data Indonesia melalui interoperabilitas sistem informasi berbasis *Application Programming Interface* (API).

### **Alternatif 2: Peningkatan Kapasitas SDM dan Optimalisasi Fungsi Analisis Kebijakan**

- a. Menyelenggarakan pelatihan teknis berkelanjutan bagi analis kebijakan (JFAK) dan pejabat perencana terkait analisis data, visualisasi kebijakan, serta evaluasi berbasis bukti.
- b. Mengembangkan kurikulum pelatihan bersama antara DRTPM, LAN, dan BRIDA untuk memperkuat kompetensi teknokratis dalam pemanfaatan data.
- c. Memberikan insentif kinerja berbasis inovasi data untuk mendorong peningkatan produktivitas dan motivasi aparatur pengelola data.

### **Alternatif 3: Revitalisasi Forum Statistik dan Kolaborasi Multi-Pihak**

- a. Menghidupkan kembali Forum Statistik Daerah secara reguler (minimal triwulanan) dengan dukungan anggaran tetap dan sistem daring hibrida.
- b. Mendorong kemitraan antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga riset untuk meningkatkan kualitas data sektoral dan penyusunan *policy paper* berbasis bukti.
- c. Melibatkan masyarakat sipil, media, dan sektor swasta dalam program *open data innovation challenge* untuk memperluas pemanfaatan data publik secara kreatif.

### **Alternatif 4: Penguatan Aspek Akuntabilitas dan Transparansi Data**

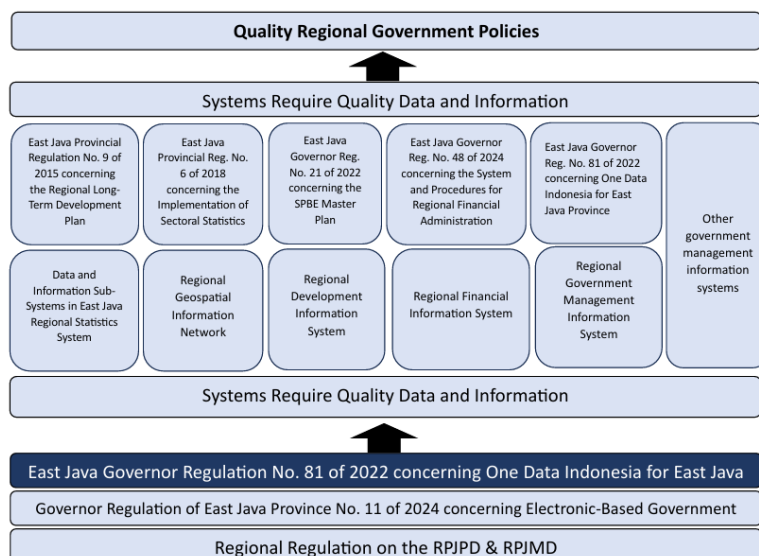
- a. Menyusun standar metadata, variabel, dan periodisasi data yang seragam di seluruh perangkat daerah.
- b. Memperluas kategori *open data* agar tidak hanya mencakup data sosial, tetapi juga sektor ekonomi, infrastruktur, dan kemiskinan.
- c. Membangun dashboard transparansi kebijakan publik yang menampilkan indikator kinerja pembangunan berbasis data SDI.



## REKOMENDASI KEBIJAKAN UTAMA

Berdasarkan analisis terhadap efektivitas, kelayakan, dan keberlanjutan dari berbagai alternatif kebijakan di atas, maka rekomendasi utama yang disarankan adalah kombinasi antara Alternatif 1 dan Alternatif 2, dengan dukungan langkah-langkah strategis berikut:

- Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Data**  
Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu segera memperbarui kerangka regulasi Satu Data agar lebih operasional dan menegaskan peran kelembagaan antar OPD. Koordinasi antara Bappeda, Kominfo, dan BPS perlu diformalkan melalui surat keputusan bersama atau nota kesepahaman lintas lembaga.
- Optimalisasi Kapasitas SDM dan Peran Analisis Kebijakan (JFAK)**  
Diperlukan penguatan peran fungsional analisis kebijakan dalam setiap tahapan siklus kebijakan, mulai dari perumusan, implementasi, hingga evaluasi. Pelatihan dan sertifikasi berbasis kompetensi analisis data serta penggunaan aplikasi SDI perlu menjadi agenda rutin.
- Pemulihan dan Digitalisasi Forum Statistik Daerah**  
Forum Statistik Daerah sebaiknya diaktifkan kembali dengan dukungan mekanisme daring agar tetap berjalan meskipun ada keterbatasan anggaran. Forum ini berfungsi sebagai *hub* koordinasi, standarisasi data, dan pembaruan metodologi statistik antar OPD.
- Penguatan Aspek Akuntabilitas dan Akses Publik terhadap Data**  
Perluasan kategori *open data* menjadi prioritas agar masyarakat, akademisi, dan sektor swasta dapat mengakses dan memanfaatkan data publik. Langkah ini akan meningkatkan transparansi, inovasi, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.



## DAMPAK YANG DIHARAPKAN

Implementasi rekomendasi di atas diharapkan dapat menghasilkan beberapa dampak positif strategis, antara lain:

- Meningkatnya interoperabilitas data antarperangkat daerah, sehingga perencanaan dan pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan tepat;
- Terbangunnya budaya birokrasi berbasis data (*data-driven bureaucracy*) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- Meningkatnya kapasitas teknokratis dan profesionalisme aparatur perencana dan analisis kebijakan;
- Terwujudnya kebijakan publik yang lebih inklusif, efisien, dan berorientasi hasil, serta peningkatan skor IKK di tingkat kabupaten/kota.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2025). Instansi Pemerintah dalam Portal Satu Data Indonesia. Bappenas. <https://data.go.id/instantion>
- Dinas Kominfo Jawa Timur. (2025). Portal Open Data Jawa Timur. Dinas Kominfo Jawa Timur.
- Fadhilah, A. N. (2024). Jawa Timur Masuk 4 Besar Provinsi dengan IPS Tertinggi 2024. Goodstats. <https://data.goodstats.id/statistic/jawa-timur-masuk-4-besar-provinsi-dengan-ips-tertinggi-2024-mbkbO>
- LAN RI. (2024). Tingkatkan Partisipasi Instansi Pemerintah dalam Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan, LAN bersiap mengawal IKK 2025. Lembaga Administrasi Negara. <https://archiveweb.lan.go.id/?p=16180>
- Pemprov Jawa Timur. (2024). Kepegawaian dalam Angka 2024. BKD Provinsi Jawa Timur. <https://bkd.jatimprov.go.id/ListKDA>
- Widaningrum, A., Retnandari, N. D., & Susanto, N. (2024). Regulatory Impact Analysis (Analisis Dampak Regulasi): Konsep & Penerapannya. UGM PRESS.

